



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG
Jalan Ican Saleh No. 77 Pangkalpinang

Laman : bapaspkp.kemenumham.go.id Surel : bapaspangkalpinang@gmail.com

Nomor : W.7.PAS.PAS.6-PR.04.03-1

02 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : LKJIP Tahun 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

Di –

Pangkalpinang

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor : W.7.PR.04.03–8111 tanggal 20 November 2023 perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester TA 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester Tahun 2023 pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andriyas Dwi Pujoyanto
NIP 198504022005011001

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUNAN TAHUN 2023

Bapas Kelas II Pangkalpinang



Baspana



KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja di Kementerian Hukum dan HAM atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang merupakan salah satu Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Perencanaan strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2020 - 2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

Laporan kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah di tetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang.

Semoga Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana Evaluasi bagi seluruh jajaran Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang agar memacu Kinerja ke depan lebih Produktif, Profesional, Ewektif dan Efisien dalam rangka Untuk memberikan Pelayanan terbaik bagi Masyarakat. Terima Kasih

Pangkalpinang, 02 Januari 2024

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andriyas Dwi Pujoyanto
NIP 198504022005011001

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Ikhtisar Eksekutif.....	vii
BAB 1. Pendahuluan.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas, Fungsi Struktur Organisasi.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Aspek Strategis.....	7
E. Isu Strategis.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2. Perencanaan Kinerja.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja.....	15
C. Alokasi Anggaran.....	17
BAB 3. Akuntabilitas Kinerja.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	30
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	32
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	34
BAB 4. Penutup.....	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38
DOKUMENTASI KEGIATAN.....	39-41
LAMPIRAN.....	43-47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bapas Pangkalpinang.....	4
Gambar 2.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024.....	12
Gambar 3.1. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	30
Gambar 3.2 Capaian Kinerja Anggaran (Smart DJA).....	32
Gambar 3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA.....	33
Gambar 3.4 Capaian Kinerja <i>E-Performance</i>	34
Gambar 3.5 Capaian Kinerja E-Monev Bappenas.....	35
Gambar 4.1 Pegawai Teladan Triwulan IV Tahun 2023	39
Gambar 4.2 Rapat Pembahasan IPKEMINDO Bapas Kelas II Pangkalpinang.	39
Gambar 4.3 Upacara Peringatan Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023.....	40
Gambar 4.4 Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan Tahun 2023	40
Gambar 4.5 Kegiatan Kerohanian.....	41
Gambar 4.6 Hasil Survei IPK dan IKM Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang.....	41

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	16
Tabel 2.2.	Pagu anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.....	17
Tabel 3.1.	Indikator Sasaran Kegiatan.....	19
Tabel 3.2.	Indikator Target, Realisasi dan Capaian Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh/melanjutkan pekerjaan diluar lembaga.....	21
Tabel 3.3.	Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh/Melanjut Kan Pekerjaan Diluar Lembaga.....	21
Tabel 3.4.	Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh/melanjutkan pekerjaan diluar lembaga.....	22
Tabel 3.5.	Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Penjara.....	23
Tabel 3.6.	Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Penjara.....	23
Tabel 3.7.	Indikator Target, Realisasi dan Capaian Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikanya.....	24
Tabel 3.8.	Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikanya.....	24
Tabel 3.9.	Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikanya.....	25
Tabel 3.10.	Indikator Target, Realisasi dan Capaian Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu.....	25
Tabel 3.11.	Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu.....	26
Tabel 3.12.	Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu.....	26
Tabel 3.13.	Indikator Target, Realisasi dan Capaian Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan.....	27



Tabel 3.14.	Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan.....	27
Tabel 3.15.	Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan.....	28
Tabel 3.16.	Indikator Target, Realisasi dan Capaian Terpenuhinya Data Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan.....	28
Tabel 3.17.	Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terpenuhinya Data Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan.....	28
Tabel 3.18.	Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Terpenuhinya Data Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan.....	29
Tabel 3.19.	Indikator Target, Realisasi dan Capaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu.....	30
Tabel 3.20.	Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu.....	30
Tabel 3.21.	Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu.....	31
Tabel 3.22.	Perbandingan Realisasi Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2022 Dan 2023.....	33
Tabel 3.23.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan.....	33



IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menterjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan Publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan dalam rangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Capaian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 belum dapat dinyatakan berhasil karena belum memenuhi Target Capaian Kinerja dan terdapat 12 (dua belas) Indikator yang telah terrealisasi diantaranya sebagai berikut :

1. Persentasi klien pemasarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna capaian 100%
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum 100%
3. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan 100%
4. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan capaiannya 100 %
5. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan capaiannya 100 %
6. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga capaiannya 124 %
7. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara capaiannya 120 %
8. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya capaiannya 120 %
9. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu capaiannya 100 %
10. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Capaiannya 100 %
11. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan Capaiannya 50%
12. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Capaiannya 100%

Dalam mendukung Capaian Kinerja di Tahun 2023 Pagu anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang setelah direvisi sebesar RP 4.100.832.000,- telah direalisasikan sebesar RP. 4.100.202.041,- atau 99,98% sesuai dengan capaian sasaran kinerja sebagai mana disebutkan diatas menunjukkan adanya kesesuaian dalam evektifitas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komerhensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai MISI Balai Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang nantinya.



BAB I

- **LATAR BELAKANG**
- **TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**
- **MAKSUD DAN TUJUAN**
- **ASPEK STRATEGIS**
- **ISU STRATEGIS**
- **SISTEMATIKA LAPORAN**



**LKJIP BAPAS KELAS II
PANGKALPINANG
TAHUNAN TAHUN 2023**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan diatas Unit Pelaksana Teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Teknisnya. Secara organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah.

Balai Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Tugasnya adalah melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsinya adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, registrasi klien, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sebelum mengikuti sidang peradilan serta memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan yang membutuhkan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang selanjutnya disingkat BAPAS Pangkalpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), Pembimbingan, Pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan serta Pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mulai dari proses penyidikan hingga dalam proses sidang peradilan.

Dalam Sistem Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan mempunyai peran penting bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau disebut Klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan dimana unsur utamanya adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mempunyai tugas utama untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.



Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang mempunyai tugas pokok melaksanakan Bimbingan Klien Pemasarakatan dan mempunyai fungsi yaitu melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam persidangan, menyusun program Bimbingan Klien Pemasarakatan, mengikuti Sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri, dan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan di Lapas dan Rutan sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan Litmas, Sidang TPP, melaksanakan Registrasi Klien Pemasarakatan, melaksanakan bimbingan terhadap klien Pemasarakatan, memberikan bantuan bimbingan kepada bekas Narapidana, anak didik dan klien Pemasarakatan yang membutuhkan (*After care*) dan melaksanakan urusan tata usaha Bapas.

A. Tugas, Fungsi Struktur Organisasi

Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang beralamat di Jl. Ican saleh No 77 Kel. BatinTikal Kec. Tamansari Pangkalpinang, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :110/M.PAN/4/2003 Tanggal : 07 April 2003 tentang Usul pembentukan dan peningkatan Kelas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.07.PR.07-03 tahun 2003 Tanggal : 16 April 2003 tentang Pembentukan Balai Pemasarakatan Kutacane, Sibolga, Bukit Tinggi, Tanjung Pinang, Lahat, Muara Bungo, Metro, Wonosari, Muara Teweh, Palopo, Bau Bau, KarangAsem, Sumbawa Besar, Sorong, Marauke, Waikabubak, Pangkalpinang, Serang dan Gorontalo.

Dalam pelaksanaan tugasnya, wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang mencakup seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas yaitu :

1. Wilayah Bangka
 - a. Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan 42 (empat puluh dua) kelurahan.
 - b. Kabupaten Bangka Tengah ibu kota Koba terdiri dari 6 (enam) kecamatan.
 - c. Kabupaten Bangka Selatan ibukota Toboali terdiri dari 5 (lima) kecamatan.
 - d. Kabupaten Bangka ibu kota Sungailiat terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan.
 - e. Kabupaten Bangka Barat ibu kota Muntok terdiri dari 5 (lima) kecamatan.
2. Wilayah Belitung
 - a. Kota Tanjung Pandan terdiri atas 5 (lima) kecamatan.
 - b. Kabupaten Belitung Timur ibu kota Manggar terdiri atas 6 (enam) kecamatan

Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.07.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal : 14 April 2003 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bapas Pangkalpinang



KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
NOMOR : M.07.PR.07.03 THN 2003 Tanggal 14 April 2003



- a. Alamat : Jalan Ican Saleh No. 77 Pangkalpinang
Telp. (0717) 438051- Fax (0717) 434580
- b. Berdiri sejak : 23 Oktober 2003
- c. Dasar Pembentukan : 1. SK Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara.
Tanggal 07 April 2003
Nomor: 110/M.PAN/4/2003
2. SK Menteri Kehakiman dan HAM RI
Tanggal 16 April 2003
Nomor M.07.PR.07-03 tahun 2003
- d. Dasar Penggunaan : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Bangunan : Tanggal 20 April 2005 Nomor A.03.PL.02.01
Tahun 2005.
Perihal Perubahan Fungsi Pemanfaatan
Bangunan Eks Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
di Pangkalpinang menjadi Kantor Balai
Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang.
- e. Kondisi Bangunan : Baik dan Layak
- f. Jumlah Pegawai : 43 Pegawai
- g. Wilayah Kerja : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.01.PR.07.03
Tanggal 12 Februari 1997 Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok :
- Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk:
 - a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang.
 - b. Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.
 - c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses



asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.

- Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
- Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
- Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
- Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

b. Fungsi :

1. Melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
2. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan
3. Pendampingan Klien Pemasyarakatan anak dalam proses penyidikan hingga persidangandi peradilan anak
4. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.



C. Maksud dan Tujuan

Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang merupakan salah satu Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja di Kementerian Hukum dan HAM atas penggunaan anggaran maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini adalah sebagai sarana informasi serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang. Sedangkan tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah untuk memaparkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang selama Tahun 2023 dan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk pelaksanaan rencana kerja pada tahun berikutnya.

D. Aspek Strategi

Adapun hal-hal yang telah dicapai oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2023 ini untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi masing-masing sub seksi antara lain :

1. Urusan Tata Usaha

- Pegawai melaksanakan tugas dan fungsi lain di luar dari uraian tugas pegawai untuk menghasilkan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang menjadi optimal.
- Penyimpanan arsip data-data klien pemsarakatan di masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

- Pemenuhan kerja sama dalam bimbingan kemandirian klien dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS).
- Mengoptimalkan sarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas.



3. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

- Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, penyidikan, penuntunan, persidangan dalam perkara anak dan proses re-integrasi sosial tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan koordinasi internal dengan Penyidik, Jaksa Dan Hakim;
- Mengikut sertakan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendidikan dan pelatihan SPPA yang di selenggarakan oleh Instansi manapun.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang tak lepas dari permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing sub seksi antara lain :

1. Urusan Tata Usaha

- Pegawai untuk petugas administratif belum proporsional di karenakan pada saat ini staf urusan tata usaha hanya berjumlah 2 (dua) orang;
- Program aplikasi berbasis IT yang dapat memberikan informasi secara langsung tentang pelayanan pembimbingan pada klien Bapas Pangkalpinang yang belum ada;
- Tidak ada tempat penyimpanan khusus arsip data-data klien Bapas Pangkalpinang secara menyeluruh dari awal pembimbingan klien yang di berikan.

2. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

- Pelaksanaan Litmas dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan kurang optimal di karenakan persediaan anggaran yang kurang;
- Pemahaman administrasi yang kurang dalam tugas fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sehingga tugas fungsi yang di laksanakan belum maksimal.
- Kesadaran klien pemasyarakatan yang kurang sadar akan kewajiban dalam pembimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang.

3. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

- Pembimbing Kemasyarakatan belum sepenuhnya menguasai Undang Undang SPPA dan Peraturan pelaksanaan melekat pada tugas fungsi yang di laksanakan.
- Aparat Penegak hukum yang melaksanakan amanat Undang Undang SPPA belum sepenuhnya selaras dengan penanganan anak.

**E. Sistematika Laporan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2023.
- DAFTAR ISI** : Menyajikan gambaran singkat sebagai letak halaman dari Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2023.
- DAFTAR GAMBAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai letak gambar dari Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023.
- DAFTAR TABEL** : Menyajikan gambaran singkat tabel kinerja dari Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2023.
- IKHTISAR EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2023.
- BAB I
PENDAHULUAN** : Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.
- A. Latar Belakang
 - B. Tugas dan Fungsi Organisasi
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Dasar Hukum
 - E. Sistematika Laporan
- BAB II
PERENCANAAN KINERJA** : Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.
- A. Rencana Strategis
 - B. Perjanjian Kinerja
- BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA** : A. Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang dalam mencapai Target Kinerja sesuai



Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

: Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja Semester selanjutnya.

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DOKUMENTASI

: Kegiatan Pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang

LAMPIRAN

: Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023



BAB II

A. RENCANA STRATEGIS

Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi yang disertai dengan indikator kinerja

B. PERJANJIAN KINERJA

Menyajikan perjanjian yaitu lembar/dokumen yang berikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja



**LKJIP BAPAS KELAS II
PANGKALPINANG
TAHUNAN TAHUN 2023**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Dalam RPJMN ke IV (tahun 2020-2024), terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 2.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024

Untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020- 2024. Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Kantor Wilayah Banten mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah : “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.



Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas.
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan.
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi.
- Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan
- Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum.
- Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan.



- Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.
- Berdasarkan Visi, Misi, serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Misinya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :
- mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
- mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- terlindunginya hak asasi manusia;
- meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata nilai ini mendukung saat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kami "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai Kami "Pasti" merupakan landasan bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.



Berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah dengan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dan mengoptimalkan peran sasaran strategis yang ada pada Dierktorat Jenderal Pemsyarakatan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang pada tahun 2023 telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai pemberi amanah dan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang sebagai penerima amanah. Melalui perjanjian kinerja inilah kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kineja pegawai.



Adapun rincian Perjanjian Kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang perlu dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang adalah:

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang
dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka
Belitung**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentasi klien pemsarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2	Memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemsarakatan Yang Berkualitas	1. Persentasi klien pemsarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	85%
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemsarakatan	85%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemsarakatan	85%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%



		3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan

C. ALOKASI ANGGARAN

Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi penyerapan anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pagu anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Pagu Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023**

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 570.750.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 570.750.000,-

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.530.082.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.530.082.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi**
- B. Realisasi Anggaran**
- C. Capaian Kinerja Anggaran**
- D. Capaian Kinerja Lainnya**



**LKJIP BAPAS KELAS II
PANGKALPINANG
TAHUNAN TAHUN 2023**

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA**

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik. Pengukuran performance Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Hasil pengukuran kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang periode Tahun 2023 diperoleh data capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1. Indikator Sasaran Kegiatan

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan



		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan

Analisis realisasi atas capaian dari sasaran strategis pada periode Tahun 2023 antara lain:

- Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat dan Pemenuhan Hak Klien Anak pada luar lembaga diwilayah sesuai standar.**

Indikator Kinerja:

- Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh/melanjutkan pekerjaan diluar lembaga.**

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Kinerja indikator Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh/melanjutkan pekerjaan diluar lembaga dapat dilihat dari jumlah klien yang telah mendapatkan pekerjaan baik menjadi pekerja perusahaan maupun menjadi wirausaha. Pada tahun 2023 Bapas Kelas II Pangkalpinang memiliki klien masyarakat dengan jumlah 1327 klien. Dari 1327 klien tersebut sebanyak 994 klien yang telah mendapatkan pekerjaan atau sekitar 63% atau 123%* (Konversi 124) capaian target kinerja dari target sebesar 60%. Dengan penghitungan sebagai berikut:

Realisasi

$$\frac{\text{Jumlah Klien Yang Bekerja}}{\text{Jumlah Seluruh Klien}} \times 100\%$$

$$\frac{994}{1105} \times 100\% = 63\%$$

Capaian

Realisasi

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{75}{60} \times 100\% = 125\%$$

**Tabel 3.2 Indikator Target, Realisasi dan Capaian****Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh/melanjutkan pekerjaan diluar lembaga**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh/melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	60 %	75 %	125%

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023 realisasi Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh/melanjutkan pekerjaan diluar lembaga meningkat di tahun 2023 yaitu sebesar 120%.

Tabel 3.3 Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja**Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh/melanjutkan pekerjaan diluar lembaga**

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh/melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	50%	50%	100%	60%	75%	125%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2022 sebesar 50% dan tahun 2023 sebesar 75 % dan diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2023 dan 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis.



Tabel 3.4 Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh/melanjutkan pekerjaan diluar lembaga

Indikator	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh/melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	50%	60%	70%	70%

Penyebab Keberhasilan

Capaian dari indikator ini salahsatunya didukung oleh pelaksanaan pelatih keterampilan dan kepribadian yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Pangkalpinang dan meningkatnya kerjasama dengan instansi lain dan pokmas lipas. Pada Tahun 2023 Bapas Kelas II Pangkalpinang melaksanakan kegiatan pembimbingan keterampilan sebanyak 1 Kegiatan berupa pelatihan pertukangan. Sedangkan untuk kegiatan pembimbingan kepribadian berupa bimbingan terkait pelayanan hukum dan kerohanian.

2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan penjara

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Pada indikator persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan penjara bahwa target pada tahun 2023 sebesar 55% dari target yang ditetapkan Bapas Kelas II Pangkalpinang. Dari target tersebut pada Tahun 2023 capaian persentase anak yang mendapatkan putusan penjara sebesar 66%. Dari 47 anak yang berhadapan dengan hukum selama kurun waktu tahun 2023 yang mendapatkan putusan penjara sebanyak 31 orang atau sekitar 66% atau capaian target kinerja sebesar 120% * (Konversi 120).

Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Realisasi

$$\frac{\text{Putusan Penjara}}{\text{Jumlah Pendampingan}} \times 100\%$$

$$\frac{31}{47} \times 100\% = 66\%$$

Capaian

Realisasi

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\frac{66}{55} \times 100\% = 120\%$$

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023 realisasi indikator persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan penjara naik dibanding tahun 2022. Hal ini disebabkan karena perbedaan target di tahun 2023 yang bertambah menjadi 120%.

Tabel 3.5 Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Penjara

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan penjara	50%	50%	100%	55%	66 %	120%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2023 sebesar 120% daripada tahun 2022 dan diharapkan dapat menurun setiap tahunnya dan mencapai target 2023 dan 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Tabel 3.6 Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Penjara

Indikator	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan penjara	60%	55%	50%	50%

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan oleh telah terimplementasinya Restorative Justice oleh APH di wilayah kerja Bapas Kelas II Pangkalpinang.

**3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikanya****Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Indikator persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikanya pada tahun 2023 mencapai 120%*(Konversi 120) dari target sebesar 35% atau dari 17 Klien anak sebanyak 15 orang yang melanjutkan pendidikanya sebanyak 5 orang tidak melanjutkan pendidikanya karena beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi serta sudut pandang orang tuanya. Pada Tahun 2023 ini capaian target pada indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana capaian target tersebut meningkat dibanding tahun 2022 dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

Realisasi

$$\frac{\text{Yang Terpenuhi/Melanjutkan}}{\text{Tidak Melanjutkan Sekolah}} \times 100\%$$

$$\frac{15}{17} \times 100\% = 88,2 \%$$

Capaian Realisasi

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{88}{35} \times 100\% = 251\% \text{ dikonversi menjadi } 252\%$$

**Tabel 3.7 Indikator Target, Realisasi dan Capaian
Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikanya**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikanya	30 %	96 %	120%

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023 realisasi indikator persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2022 terjadi penambahan target sebesar 5% atau 30%.

**Tabel 3.8 Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikanya**

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikanya	25%	25%	100%	30%	96 %	120%

**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 120% dan diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2023 dan 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Tabel 3.9 Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	30%	35%	35%

Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya karena berhasilnya kerjasama antar penegak hukum dan pihak terkait turut mendukung pencapaian indikator ini.

1. Meningkatnya layanan dukungan Manajemen**Indikator:****1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.****Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Pada indikator ini Bapas Kelas II Pangkalpinang telah membuat dokumen rencana kerja di Tahun 2023 serta penganggaran dan pelaporan yang tepat waktu juga akuntabel. Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan secara periodik dan tepat waktu.

Tabel 3.10 Indikator Target, Realisasi dan Capaian

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021 realisasi indikator Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu adalah sama serata realisasi yang sama yaitu 100%.

Tabel 3.11 Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 sebesar 100% dan sudah mencapai di target tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.12 Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

Indikator	Target			
	2022	2023	2024	2025
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1Layanan	1Layanan	1Layanan	1Layanan

Penyebab Keberhasilan

Indikator ini dapat 100% Capainya disebabkan oleh telah tersedianya dokumen rencana kerja anggaran pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang serta tersedianya laporan-laporan secara tepat waktu.

**2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022**

Indikator keberhasilan dari tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan pada Bapas Kelas II Pangkalpinang yaitu telah tersedianya Laporan Pengelolaan BMN serta adanya Daftar Inventaris Ruang. Capaian dari indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3.13 Indikator Target, Realisasi dan Capaian Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023 realisasi indikator Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu adalah sama yaitu 100%.

Tabel 3.14 Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2021 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100% dan sudah mencapai di target tahun 2023 dan 2024.

**Tabel 3.15 Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan**

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1Layanan	1Layanan	1Layanan	1Layanan

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian pada indikator ini disebabkan telah tersedianya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan pada Balai Pemasaryataan Kelas II Pangkalpinang.

3. Terpenuhinya Data Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasaryataan**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Peningkatan kompetensi pegawai pada Balai Pemasaryataan Kelas II Pangkalpinang terlihat dari terpilihnya salah satu pegawai Baali Pemasaryataan kelas II Pangkalpinang yang mendapatkan bea siswa Strata 2 dari Oxford University London.

Tabel 3.16 Indikator Target, Realisasi dan Capaian**Terpenuhinya Data Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasaryataan**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data peningkatan kompetensi pegawai pemasaryataan	1 Layanan	1 Layanan	100%

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**Tabel 3.17 Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja****Terpenuhinya Data Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasaryataan**

Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data peningkatan kompetensi pegawai pemasaryataan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%



Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023 realisasi indikator Terpenuhinya data peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan adalah sama realisasi yang sama yaitu 100%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100% dan sudah mencapai di target tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.18 Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Terpenuhinya Data Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya data peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1Layanan	1Layanan	1Layanan	1Layanan

Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator dokumen yang telah disusun karena pada tiap masing-masing tupoksi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang bertanggungjawab dalam membuat laporan dan dapat di pertanggungjawabkan.



1. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Pada tahun 2023 indikator tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 1 layanan seperti yang tergambar pada tabel dibawah.

Tabel 3.19 Indikator Target, Realisasi dan Capaian

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023 realisasi indikator Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu adalah sama realisasi yang sama yaitu 100%.

Tabel 3.20 Indikator Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 sebesar 100% dan sudah mencapai di target tahun 2023 dan 2024.



Tabel 3.21 Indikator Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu	1Layanan	1Layanan	1Layanan	1Layanan

Penyebab Keberhasilan

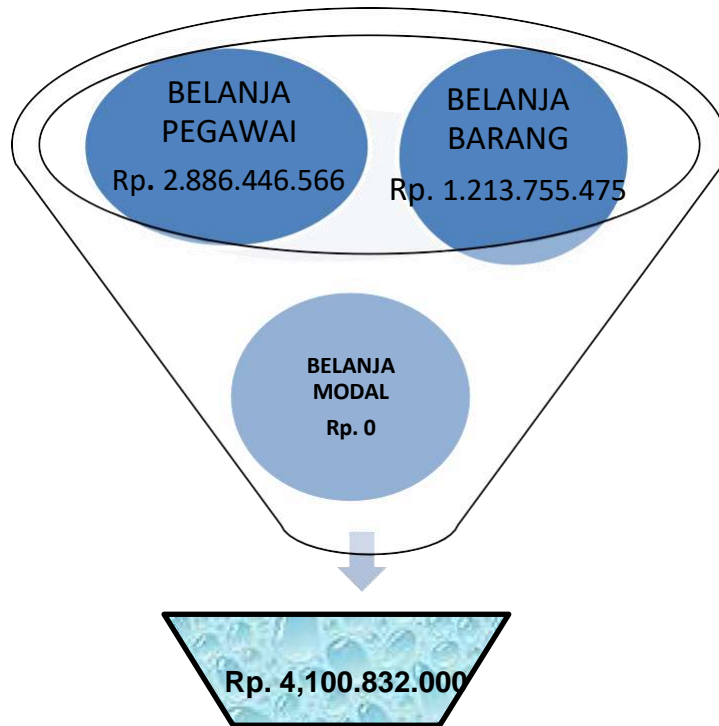
Keberhasilan dari indikator ini adalah telah tersusunya Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Selain itu realisasi anggaran yang sesuai dengan target.



B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Satker Per Jenis Belanja

Pada tahun 2023 Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 4,100,832,000,- setelah direvisi hingga 31 Desember 2023 telah berhasil merealisasikan sebesar Rp. 4,100,921,041,- atau sebesar 99,98%. Adapun rincian realisasi anggaran sebagai berikut:



Gambar 3.1 Rincian Realisasi Anggaran



Sedangkan perbandingan realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II

Pangkalpinang Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2022 Dan 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
TAHUN 2022				
Belanja Pegawai	2.785.984.000	2.785.813.740	134.260	100
Belanja Barang	1.996.657.000	1.994.851.184	1.805.816	99,91
Belanja Modal	100.000.000	99.880.000	120.800	99,98
Total	4.354.794.000	4.347.325.715	7.468.285	99,96
TAHUN 2023				
Belanja Pegawai	2.886.561.000	2.886.446.566	114.434	100
Belanja Barang	1.214.271.000	1.213.755.475	515.525	99,95
Belanja Modal	0	0	0	0
Total	4,882,605,000	4,880,544,924	2,060,076	99,98

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan

Berikut data penyerapan Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang per sasaran Kegiatan sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian sasaran kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang.

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	TOTAL		Persentase
	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	570,750,000,-	570,644,250,-	99,98%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	3,530,082,000,-	3,529.557.791,-	99,99%

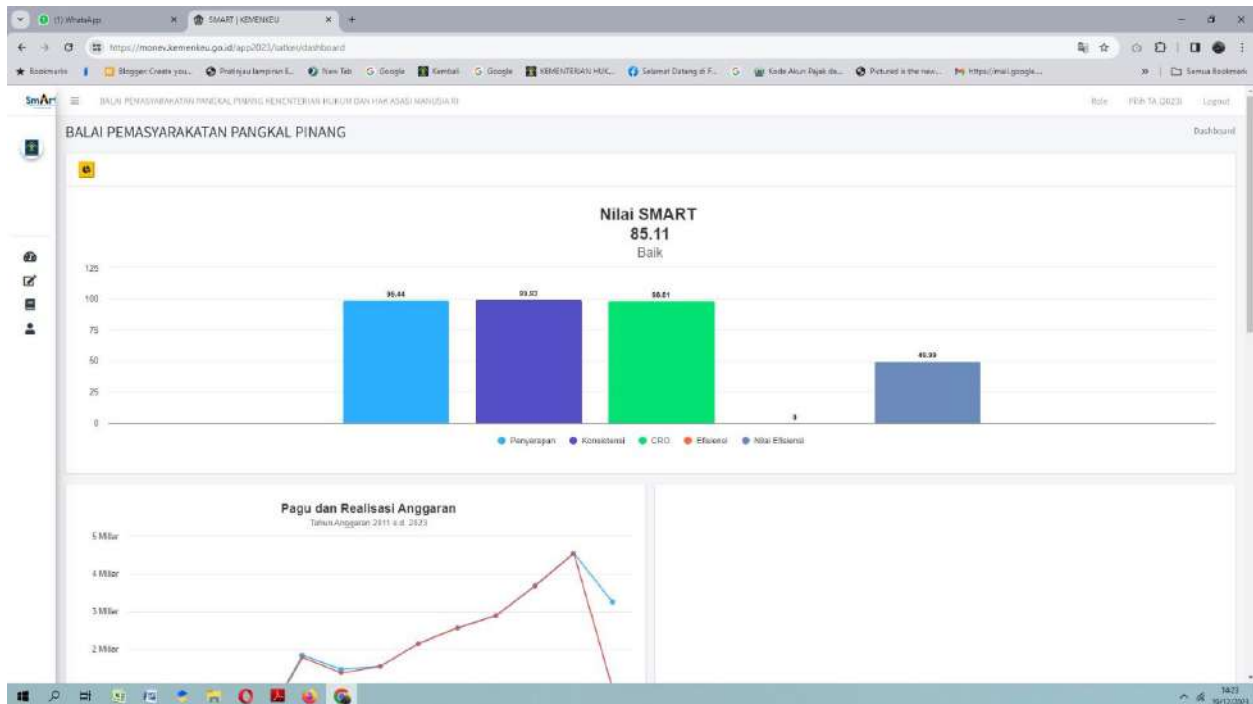


C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. NILAI Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 98,98%
- Penyerapan Anggaran, bobot 99,94%
- Efisiensi, bobot 49,99%
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 99,96%.



Gambar 3.2 Capaian Kinerja Anggaran (Smart DJA)



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%;
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- Belanja Kontraktual, bobot 10%
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- Dispensasi SPM, bobot 5%;
- Capaian Output, bobot 25%

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN PANGKAL PINANG**

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPP/11	Kode BA	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Koreksi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Koreksi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	018	013	693222	BALAI PEMASYARAKATAN PANGKAL PINANG	Nilai	100,00	94,18	100,00	100,00	100,00	97,58	100,00	100,00	99,18	100%	99,18
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	9,42	20,00	10,00	10,00	4,78	25,00				
					Nilai Aspek		97,00			99,52		100,00				

hal : 1 dari 1 halaman tanggal cetak : 22-01-24 06:09:27 (men) : 693222

Gambar 3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA

Nilai IKPA Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2023 adalah sebesar 99,18%.

D. CAPAIAN KINERJA LAINYA

1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi performance Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Adapun capaian e-performance Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The screenshot displays the 'PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023' interface for the 'BALAI PEMASYARAKATAN PANGKAL PINANG'. It features a table with columns for 'SASARAN STRATEGIS', 'INDIKATOR KINERJA', 'KASCADE', 'TARGET', and 'REALISASI'. The 'REALISASI' column includes a detailed 'URAIAN' (description) of performance achievements for each quarter (T1, T2, T3, T4).

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	KASCADE		TARGET				REALISASI		CAT MON		
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN		LAMPIRAN	
1.	Memperkuat Pelayanan-pelayanan Klien Pemasyarakatan dan pemenuhan hak pemidanaan di era era pada tataran lembaga (di wilayah sesuai tugas)	1	Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga Sasaran Kinerja Pegawai :			30 Persen Triwulan IV	TW1	0	0	0	0	Januari : Belum Ada Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga Februari : Belum Ada Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga Maret : Belum Ada Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga April : Belum Ada Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga		
							TW2	0	0	0	0	April : Belum Ada Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga Masi : Belum Ada Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga Juni : Belum Ada Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga		
						55 Persen Triwulan IV	TW1	0	0	0	0	Desember : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga Januari : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga Februari : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga Maret : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga April : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga Masi : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga Juni : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga Juli : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga Agustus : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga September : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga Oktober : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga November : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga		
							TW2	0	0	0	0	Oktober : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga November : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga Desember : Belum ada pemenuhan Anuk yang mendapatkan pekerjaan di luar lembaga		

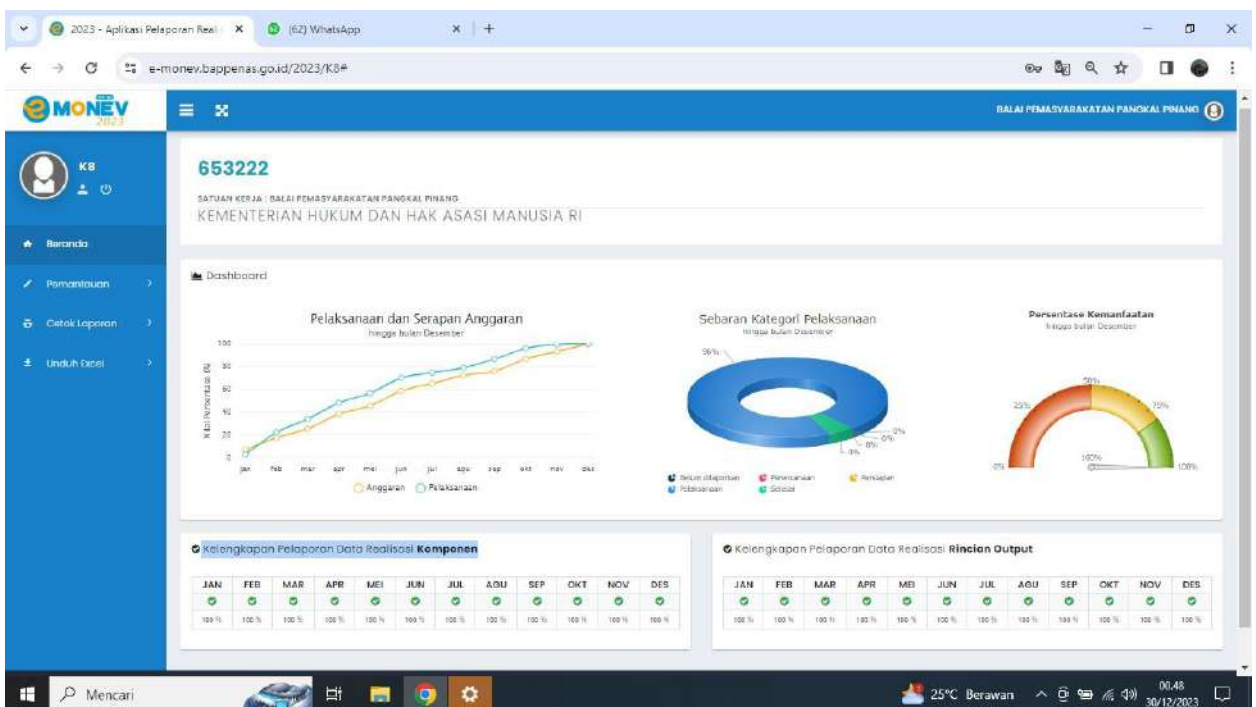
Gambar 3.4 Capaian Kinerja E-Performance

2. E-MONEY BAPPENAS

Capaian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang berdasarkan *E-Monev Bappenas*, sebagai berikut :

Persentasi Kemanfaatan :

1. Belum dilapor, 0%
2. Perencanaan, 25%
3. Persiapan, 75%
4. Pelaksanaan, 100%
5. Penyelesaian, 100%



Gambar 3.5. Capaian Kinerja *E-monev Bappenas*

Pada tahun 2023 Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang memperoleh hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi dengan nilai sangat baik. Tuntaskan tugas dan fungsi, Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang telah menyelesaikan 1.807 hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Sebanyak 1.675 Penelitian Kemasyarakatan (litmas) Klien Dewasa dan 132 Klien Anak.

Pelaksanaan Kerjasama dengan instansi terkait dan kelompok masyarakat peduli pemasarakatan juga meningkat di tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. kesimpulan

B. Saran



**LKJIP BAPAS KELAS II
PANGKALPINANG
TAHUNAN TAHUN 2023**



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan pelaksanaan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ditargetkan Tahun 2023 pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang terdapat 2 sasaran kegiatan dengan indikator kinerja berjumlah 7 indikator kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang dengan Kepala Kantor Wilayah Kemnterian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Untuk mendukung capaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan program-program pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang dengan pagu anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2023 setelah direvisi yaitu sebesar Rp. 4.100.832.000,.
2. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada periode tahun 2023, seluruh sasaran strategis dengan jumlah 2 sasaran strategis adalah 100% dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023.
3. Untuk realisasi anggaran dari 7 indikator pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang, penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 mencapai 99,98 % atau sejumlah Rp. 4.100.202.041,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.100.832.000,-.
4. Berdasarkan hasil pengukuran capaian dari indikator kinerja dan realisasi anggaran maka dapat diketahui performance Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang pada tahun 2023 adalah 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun 2023 kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang secara keseluruhan sangat baik dan produktif.

**B. SARAN**

Mengatasi permasalahan-permasalahan di atas untuk meningkatkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang khususnya dalam pencapaian sasaran kegiatan harus dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Urusan Tata Usaha

- a) Mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk pengadaan belanja modal berupa kendaraan dinas bermotor roda empat maupun roda dua guna tugas fungsi teknis Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang untuk bisa melakukan penghematan belanja perjalanan dinas.
- b) Mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk pengadaan belanja modal berupa sarana penunjang perkantoran guna tugas fungsi teknis Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang, seperti halnya perangkat unit komputer, Laptop, printer, scanner
- a) Pengusulan penambahan pegawai dengan formasi fungsional umum untuk meningkatkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang.
- b) Pengajuan usulan penambahan perluasan gedung kantor.

2. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

- a) Meningkatkan koordinasi dengan pihak lapas, rutan, cab. rutan.
- b) Meningkatkan optimalisasi dan memaksimalkan tugas fungsi yang ada.
- c) Meningkatkan pengawasan terhadap klien guna mencegah adanya pengulangan tindak pidana selama masa bimbingan berlangsung

3. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

- a) Meningkatkan koordinasi dengan Pihak kepolisian, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, BNNK, Peksos, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- b) Meningkatkan optimalisasi dan memaksimalkan tugas pokok fungsi yang ada.
- c) Aktif dalam memberikan informasi dan pengarahan atas tugas dan tanggung jawab orang tua atau wali anak yang berhadapan dengan hukum.

Demikian Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.



DOKUMENTASI KEGIATAN

3/4

Pemilihan pegawai teladan diselenggarakan tiap tiga bulan sekali berdasarkan penilaian terhadap kinerja, dedikasi, kerja sama dan disiplin pegawai. Ke empat indikator ini dinilai langsung oleh seluruh pegawai dan pejabat struktural dengan secara Transparan dan akuntabel dengan metode Polling..



“Pegawai teladan terpilih pada triwulan terakhir di 2023 ini adalah Suandi yang menjabat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda. Penghargaan diserahkan langsung oleh Andriyas dengan memberikan piagam kepada Suandi saat pelaksanaan apel pagi di halaman Bapas Pangkalpinang



Gambar 4.1. Pegawai Teladan Triwulan IV Tahun 2023

3/6

IPKEMINDO (Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia) adalah organisasi yang mewadahi Profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK). DPW Ipkemindo Bangka Belitung saat ini dijabat oleh Sissi Anatasia Rosalina sebagai Ketua, Ari Yulian sebagai Bendahara, dan Suandi sebagai Sekretaris dalam pelaksanaan organisasi Ipkemindo Babel saat ini dianggotai oleh 37 Orang anggota yang seluruh nya adalah PK dan APK yang bertugas di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalpinang.



Membuka jalannya Rapat, Sissi mengatakan pertemuan yang dilakukan saat ini untuk menyusun program kerja Ipkemindo tahun 2023 sekaligus monitoring dan mengevaluasi selama kepengurusan berlangsung.



Gambar 4.2 Rapat Pembahasan Tentang IPKEMINDO (Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia)



Gambar 4.3 Upacara Peringatan Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023



Gambar 4.4 Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan Tahun 2023

LKjIP Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023



Gambar 4.5 Kegiatan Kerohanian



Gambar 4.6 Hasil Survei IPK dan IKM Bapas Kelas II Pangkalpinang

LKjIP Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Bapas Kelas II Pangkalpinang 2022
- Perjanjian Kinerja Bapas Kelas II Pangkalpinang 2023
- Penyerapan Anggaran Per Sasaran Strategis



**LKJIP BAPAS KELAS II
PANGKALPINANG
TAHUNAN TAHUN 2023**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Setiawan
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 03 Januari 2022

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Pangkalpinang

Iwan Setiawan
NIP. 198411222005011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Masyarakat yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.137.550.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.137.550.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.685.126.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 2.685.126.000

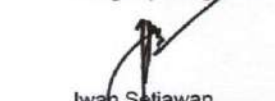
Pangkalpinang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Pangkalpinang



Iwan Setiawan
NIP. 19841222005011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Setiawan
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas II Pangkalpinang


Iwan Setiawan
NIP 198411222005011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Setiawan
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas II Pangkalpinang

Iwan Setiawan
NIP 198411222005011001